



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUTIMIN**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN**
3. NHK : **755009**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 585.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 380 m2/96 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, WARISAN Rp. 280.000.000
2. Tanah Seluas 1124 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, WARISAN Rp. 155.000.000
3. Tanah Seluas 842 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, WARISAN Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 2200 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, WARISAN Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 28.700.000

1. MOBIL, SUZUKI STATION Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 187.733

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 613.887.733

III. HUTANG

Rp. 28.931.740

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 584.955.993

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.